



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANUS HARON TADON
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 637429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m ² /60 m ² di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m ² /154 m ² di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	21.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOTOR, HONDA VERSA CB 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	476.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	476.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMANUS HARON TADON
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 637429

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/154 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/154 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA VERSA CB 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	490.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	490.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IBRAHIM KADER
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 999167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	78.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m ² /126 m ² di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.239.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	81.239.000
III. HUTANG	Rp.	7.250.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	73.989.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDRIS BEDA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 661661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/63 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA DIB02N2653AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.000.000
Sub Total	Rp.	267.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	267.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDRIS BEDA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 661661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	160.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/63 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.500.000
1. MOTOR, HONDA DIB02N2653AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	35.000.000
Sub Total	Rp.	309.500.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	309.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PETRUS PAULUS JUANG
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 1009132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m ² /35 m ² di KAB / KOTA LEMBATA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, REVVO FIT HONDA/NF11T11C0 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	555.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	16.555.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.555.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](#). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](#), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAULINA YESUA BENGAN TOKAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622476

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	560.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 5.000 m ² /140 m ² di KAB / KOTA LEMBATA, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 560.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 54P(CAST WHEEL) AT/ SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.348.920
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	763.348.920
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	763.348.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.